



RENJA

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

2026





BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

10. Desa ...

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20 Anggaran ...

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
25. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
27. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

29. Kegiatan ...

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
30. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 merupakan pedoman rencana Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang urusan/unsur, tanggung jawab dan fungsi.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- (5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dalam SIPD.
- (6) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
- (7) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. pendanaan dan sumber pendanaan; dan
- d. dukungan terhadap prioritas nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2026

Pasal 5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 memedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, serta Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. terjadi ...

- c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja; dan
 - d. terjadi perubahan Renstra PD;
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 7

Perubahan Renja PD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2026;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2026; dan
- c. penetapan perubahan Renja PD Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

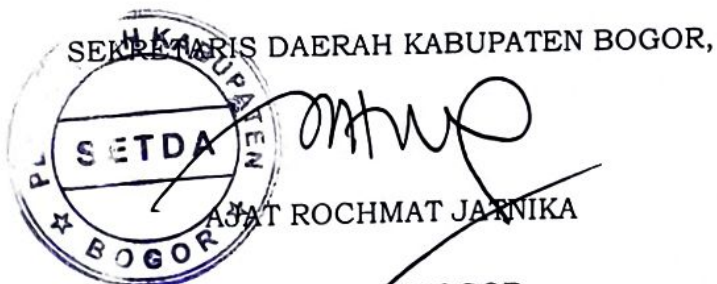
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas curahan rahmat dan ridho-Nya, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Penyusunan Renja Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra. Berpedoman pada RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah selaras dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun dengan beberapa tahapan, meliputi: Persiapan Penyusunan Renja; Penyusunan Rancangan Awal Renja; Penyusunan Rancangan Renja; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja; dan Penetapan Renja. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 disajikan dengan sistematika: Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Lalu,

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penutup. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026.

Demikian Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja khususnya Bappenda sehingga dapat mendorong terwujudnya Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor serta program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.

Cibinong, 31 Juli 2025



ADI MULYADI, S.H, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 197701102005011013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	9
1.4.	Sistematika Penulisan	9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024	
2.1.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	14
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	88
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	93
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	96
2.5.	Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat	127
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	III-1
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	129
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	134
3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	138
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	143
BAB V	PENUTUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	16
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2024	89
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bogor	98
Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bogor	128
Tabel 3.1	Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	130
Tabel 3.2	Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026	132
Tabel 3.3	Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional	133
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026	137
Tabel 3.5	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026	142
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026	144

**RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 disusun secara simultan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Di samping itu, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2026 menjadi bagian dari tahapan “fondasi” periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, yang telah dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, substansi Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2026 telah memedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta tujuan dan sasaran daerah, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan keuangan.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan
6. Penetapan Renja.

Khususnya dalam tahap kelima, perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disinkronisasikan dengan substansi

yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Di sisi lain, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disusun secara simultan bersama dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026, sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam substansi RKPD. RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam APBD tidak boleh berbeda dengan program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam RKPD Tahun 2026.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menggambarkan adanya hubungan sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan di Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Renja juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Renstra-KL), yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
31. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
38. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor);
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
49. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101) ;
51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26) ;

52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23) ;
53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 45) ;
54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20) ;
55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 24) .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026;
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026;
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang terdapat pada masing-masing bab.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

2.1. Capaian Kinerja Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

Bab ini memuat :

- Berupa tujuan, sasaran, program dan kegiatan 5 tahun sebelumnya, hingga tahun 2024 (2020-2024), yang telah dievaluasi pada akhir tahun masing-masing, sebagaimana format tabel 2.1 terlampir. Disamping itu, data yang harus disajikan dalam dokumen adalah indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tercapai, terlampaui, dan tidak tercapai. Jika terlampaui dan tidak tercapai, wajib menyertakan alasan. Untuk target yang tidak tercapai, wajib menyertakan upaya yang akan dilaksanakan untuk tahun 2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menginformasikan pencapaian kinerja perangkat daerah, dengan rincian :

- Penjelasan naratif ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2024 antara target dan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian (tujuan dan sasaran) tahun 2024 terhadap capaian tahun 2023, jika memiliki kinerja yang sama.
- Penjelasan naratif ketercapaian target kinerja program (outcome) tahun 2024 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian outcome tahun 2024 terhadap capaian tahun 2023 jika memiliki outcome yang sama.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Bagian ini mengulas/menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Dalam hal ini, menguraikan kinerja program yang perlu ditingkatkan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah, karena belum mencapai target.
- Uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam hal ini uraikan rumusan permasalahan dalam bentuk poin.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dalam hal ini, uraikan poin isu strategis perangkat daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja PD, misalnya : terdapat rumusan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal Renja atau program/kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarnya beda. Dituangkan pada Tabel 2.3 dengan format sebagaimana terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Berisi hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan yang terkait dengan kewenangan perangkat daerah. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dituangkan pada Tabel 2.4 dengan format sebagaimana terlampir.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisi telaahan keterkaitan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional (asta cita) serta Provinsi Jawa Barat (salapan langkah) dengan kewenangan (perangkat daerah), dengan mensinergikan antara program yang tengah disusun dalam Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2025-2029, sebagaimana format Tabel 3.1 dan 3.2 terlampir. Perhatikan pula keterkaitan pelaksanaan kewenangan perangkat daerah dengan substansi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, sebagaimana format Tabel 3.3 terlampir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah beserta indikatornya sebagaimana telah tercantum dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai format Tabel 3.4.

Sebagai penjelasan, tujuan perangkat daerah adalah apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahunan, sebagai implementasi dari sasaran daerah. Adapun sasaran perangkat daerah adalah implementasi tujuan tahunan perangkat daerah yang akan dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan, serta menghasilkan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- Disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam SIPD.
- Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026.
- Berorientasi pada pencapaian kinerja perangkat daerah serta kebijakan nasional yang ditetapkan untuk daerah melalui pelaksanaan kewenangan perangkat daerah.

Tercantum sebagaimana format tabel 3.5 terlampir.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menjelaskan dan menguraikan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 berdasarkan :

- a. Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
- b. RKPD Tahun 2026 (Renja PD memedomani substansi sebagaimana tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026)

Dituangkan pada tabel 4.1 dengan format sebagaimana terlampir.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA tahun anggaran 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

2.1 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 108,57% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Uraian capaian kinerja IKU adalah sebagai berikut, indikator tujuan :

- 1) Rasio PAD terhadap APBD, dari target sebesar 40,80% terealisasi sebesar 44,71% atau capaian kinerja sebesar 109,57%.

Indikator Sasaran :

- 1) Rasio Pajak Daerah terhadap APBD, dari target sebesar 26,65% terealisasi sebesar 28,66% atau capaian kinerja sebesar 107,58%.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas merupakan hasil kontribusi dari 1 program utama, 1 kegiatan, dan 15 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebanyak 15 sub kegiatan;
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - e. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - f. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - g. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - h. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - i. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;

- j. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- k. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
- l. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- m. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- n. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- o. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp.202.547.051.780,00 atau 97,14% dari target sebesar Rp.208.515.775.455,00. Pada bagian ini diuraikan materi terkait : 1) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel 2.1.dibawah.ini.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

URUSAN / UNSUR
 BIDANG URUSAN
 PERANGKAT DAERAH

: PENUNJANG
: KEUANGAN
: BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2020															
30	03	31				Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rupiah	7.702.379.502.346						
30	03	31	0001			Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah	Dokumen	17						
30	03	31	0002			Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen	6						
30	03	32				Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Presentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	63,28						
30	03	32	0001			Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	Dokumen	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	33				Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah							
30	03	33	0001			Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Dokumen	10						
							Jumlah rupiah Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Rupiah	2.827.923.538.176						
30	03	33	0002			Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	Orang	249						
30	03	33	0003			Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	Media Elektronik	3						
							Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	Orang	1.753						
							Jumlah Sosialisasi Media Cetak	Media Cetak	3.209						
30	03	33	0004			Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah : Dokumen laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Dokumen	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah untuk 10 Jenis Pajak Daerah dan 2 Retribusi Daerah	Dokumen	2						
30	03	33	0005			Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	Dokumen	12						
							Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	Dokumen	12						
30	03	33	0006			Pengelolaan Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Bulan	12						
30	03	34				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah	Rupiah	699.320.434.971						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang membayar	Rupiah	33.775.911.204						
							Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib Pajak	3.078						
30	03	34	0001			Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi	Wajib Pajak	455						
30	03	34	0002			Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah yang dapat dilayani	Wajib Pajak	534						
30	03	34	0003			Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD	38.554						
30	03	34	0004			Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan intensifikasi	Wajib Pajak	97						
30	03	34	0005			Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang akan diperiksa	Wajib Pajak	-						
30	03	34	0006			Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	Nota Perhitungan Pajak Daerah	11.090						
30	03	34	0007			Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang tersedia	Dokumen	12.592						
30	03	34	0008			Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Dokumen	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	34	0009			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang membayar	Rupiah	32.191.401.073						
30	03	35				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rupiah	526.068.200.819						
							Jumlah Piutang PBB P2 Yang Terbayar	Rupiah	116.557.518.931						
							Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP * 100% (Collection Ratio)	Persentase	97,46						
30	03	35	0001			Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2	Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Kecamatan	2						
								Objek Pajak	53.598						
30	03	35	0002			Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Kecamatan yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	Kecamatan	20						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Objek Pajak analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP	Objek Pajak	400						
30	03	35	0003			Verifikasi Obyek Pajak PBB P2	Jumlah kecamatan yang diverifikasi	Kecamatan	40						
							Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	Objek Pajak	1.500						
30	03	35	0004			Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	Kecamatan	40						
							Jumlah Objek Pajak PBB P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Temilai dan Ditetapkan	Objek Pajak	152						
30	03	35	0005			Pemutahiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Kecamatan	1						
							Jumlah Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Objek Pajak	7.827						
30	03	35	0006			Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang dilakukan Penetapan Pajak	Objek Pajak	98.436						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah kecamatan yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB	Kecamatan	40						
30	03	35	0007			Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak dan ditetapkan	SPPT PBB	1.910.165						
30	03	35	0008			Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Locket PBB P2 terlayani	Wajib Pajak	102.296						
30	03	35	0009			Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Pemohon Layanan Berkas administrasi PBB P2 yang dikelola	Berkas	170.474						
30	03	35	0010			Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah Dana Penerimaan PBB P2 Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling yang terealisasi	Rupiah	197.590.337.630						
							Jumlah NOP Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling PBB P2 yang terealisasi	NOP	1.016.097						
30	03	35	0011			Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Kecamatan	40						
							Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Dokumen	12						
30	03	35	0012			Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2	Jumlah Ketetapan SPPT PBB P2 yang terdistribusikan	SPPT PBB	1.812.113						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	35	0013			Penagihan PBB P2	Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2	Rupiah	116.392.774.270						
							Jumlah NOP Penerimaan Piutang PBB P2	NOP	905.094						
30	03	35	0014			Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan dan Pembebasan PBB P2	Jumlah data Wajib Pajak yang tertangani keberatan, pengurangan pembetulan PBB P2	Wajib Pajak	5.275						
30	03	36				Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah	473.405.407.743						
30	03	36	0001			Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	Perumahan	115						
30	03	36	0002			Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	Laporan	12						
30	03	36	0003			Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB	Jumlah Dokumen SSPD Yang Terverifikasi	Berkas	34.125						
30	03	36	0004			Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	Berkas	34.125						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	36	0005			Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaks BPHTB	Laporan	12						
30	03	36	0007			Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	Laporan	12						
30	03	37				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	Persentase Realisasi Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	Persentase	100						
30	03	37	0001			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja per bulan	%	87						
30	03	37	0002			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri per bulan	%	97						
30	03	37	0003			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol per bulan	%	92						
30	03	37	0004			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung per bulan	%	103						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	37	0005			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi per bulan	%	102						
30	03	37	0006			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin per bulan	%	89						
30	03	37	0007			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup per bulan	%	95						
30	03	37	0008			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas per bulan	%	112						
30	03	37	0009			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg per bulan	%	85						
30	03	37	0010			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang per bulan	%	86						
30	03	01				Program Pelayanan Adminitrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Persentase	80,00						
							Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	Persentase	80,00						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Persentase Perencanaan sesuai Target	Persentase	100,00						
							Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai	Persentase	100,00						
							Persentase Pelayanan Kepegawaian	Persentase	100,00						
30	03	01	0001			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan	12						
30	03	01	0003			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis	5						
30	03	01	0004			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan rapat dan tamu makan minum yang tersedia	Porsi	6.900						
30	03	01	0050			Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Dokumen	12						
30	03	01	0051			Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Jenis rekening	4						
30	03	01	0052			Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah orang pelayanan jasa keamanan kantor	Orang	12						
30	03	01	0053			Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis rekening	2						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	01	0054			Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit	3						
30	03	01	0205			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis rekening	10						
30	03	01	0206			Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Perengkapan Gedung kantor yang tersedia	Jenis rekening	4						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Utama Kantor									
30	03	01	0251			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Gedung	2						
30	03	01	0353			Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	Jumlah Jenis Kantor yang terpelihara	Jenis	1						
30	03	01	0354			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	50						
30	03	01	0355			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis rekening	1						
30	03	01	0356			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang terpelihara	Jenis rekening	4						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	01	0357,			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi yang terpelihara	Jenis rekening	2						
30	03	01	0450			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Jenis Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jenis rekening	4						
30	03	01	0900			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jenis rekening	11						
30	03	01	0901			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis rekening	9						
30	03	01	0902			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis rekening	11						
30	03	01	0903			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis rekening	11						
30	03	01	0904			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis rekening	11						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	01	0905			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis rekening	11						
30	03	01	0906			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis rekening	10						
30	03	01	0907			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis rekening	12						
30	03	01	0908			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis rekening	11						
30	03	01	0909			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jenis rekening	11						
30	03	01	1000			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang	7						
							Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan	12						
30	03	01	1001			Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	Orang	100						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Bulan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Bulan	12						
30	03	01	1002			Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Pramuka yang tersedia	Stel	200						
30	03	01	1003			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	6						
							Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12						
30	03	01	1004			Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	100						
							Jumlah Bulan Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Bulan	12						
30	03	01	2001			Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan Bappenda	Dokumen	3						
30	03	01	2002			Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Jenis rekening	5						
30	03	01	2003			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	Jenis rekening	4						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	01	2004			Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	Jenis rekening	4						
30	03	01	2005			Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis rekening	3						
30	03	01	2007			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Bappenda	Jenis rekening	5						
30	03	01	2008			Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Kinerja	Jenis rekening	5						
							Jumlah Sosialisasi media massa	Bulan	12						
2021, 2022, 2023, dan 2024															
5	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100	91,61	98,22	100	100	100
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen		41	41	18	18	18	100
							Tersedianya Pedoman Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		41	41				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali		2	1				
							Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		3	3				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				4	4	4	100
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen		1	1				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (2024)	Dokumen				1	1	1	100
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1				
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen				1	1	1	100
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen		1	1				
							Jumlah Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen		1	1				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				2	2	2	100
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	1				
							Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dokumen		1	1				
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				2	2	2	100
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Sakip)	Dokumen		4	4				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				4	4	4	100
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja (Evkin Triwulanan) Perangkat Daerah	Dokumen		4	4				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen		24	24				
							Jumlah Publikasi Kinerja	Kali		136	147				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	4	4	100
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		1.167	1.167				
							Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	%		100	100	100			
							Jumlah dokumen Penatausahaan dan laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen					7		
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan perangkat daerah	Orang		210	210		210	210	100
							Jumlah bulan gaji dan tunjangan yang diperoleh	Bulan		12	12		12	12	100
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang				183			
					03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan verifikasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		1.100	1.100	1.100	1100	1100	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		14	14				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				14	14	14	100
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		1	1				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1	1	1	100
					06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		3					
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan yang disusun	Dokumen		48	48				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					48	49	49	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		1	1				
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1	1	1	100
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		12	12				
							Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%		90	100	100			
					01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		110	544				
							Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang		420					
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					4	1	1	100
					02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Orang		220	276	-	3	2	66,6666667
					03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang		7	7				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah bulan tenaga pendukung administrasi/teknis yang tersedia	Bulan		12	12				
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2	12	12	100
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Sistem		5	5				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					4	12	12	100
					05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen		12	12	12	12	12	100
					09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan			-	12				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					399	331	331	100
					10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan peraturan yang disosialisasikan	Bulan		12	240				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					185	200	200	100
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	Kali		1	1				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					200	200	200	100
5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Layanan		10	10				
							Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%		100	100	100			
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik Yang Tersedia	Jenis		3	4				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	2	2	100
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis		25	5	6	9	9	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		37	18	2	2	2	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		16	16	2	2	2	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		18	23	2	2	2	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		7	5	2	2	2	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		36	22	2	2	2	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		20	28	2	2	2	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		20	19	2	2	2	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		34	22	2	2	2	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		13	21	2	2	2	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		14	35	2	2	2	100
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		2	12	1	2	2	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		34	16	1	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		17	13	1	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		17	19	1	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		22	16	1	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		22	16	1	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		11	18	1	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		21	19	1	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		16	16	1	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		15	19	1	1	1	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		19	20	1	1	1	100
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis		5	5	10	9	9	100
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak yang tersedia	Jenis		10	4	6	6	6	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar		12.900	14.900	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis		1	1	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar		1	17.500	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis		1	1	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis		1	1	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Jenis Cetak yang tersedia pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis		1	1	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis		1	1	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis		1	1	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar		1	13.500	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar		13.250	117.500	1	1	1	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan		12	12				
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	Bulan		12	12				
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi yang diberikan makanan dan minuman	Porsi		13.255	3.625		11	11	100
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Bulan		12	12		12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		12	12		2	2	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		11	11		2	2	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		12	12		2	2	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		12	12		2	2	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		12	12		2	2	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		12	12		2	2	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		12	12		2	2	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		12	12		2	2	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		12	12		2	2	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan		11	11		2	2	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD	Jenis		46	4		12	12	100
					11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pendukung berbasis elektronik pada SKPD	Sistem		1			-		
5	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%		97	100	100			
							Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan						12		
					01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan operasional sebanyak	Unit		6					
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit		12					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Jenis		2					
					09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan gedung kantor	Jenis		1	1				
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor								
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung		1	1	1	1	1	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung		1	1	1	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung		1	1	1	1	1	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung		1	1	1	1	1	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung		1	1	1	-	-	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung		1	1	1	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung		1	1	1	1	1	100
5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	%		96	100				
							Jumlah laporan jasa penunjang perangkat daerah						12		0
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan		12	12				
							Jumlah jenis rekening yang dibayarkan	Jenis		4	4	4	12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12	12	12	12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis							
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		2	2	1	1	1	100
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan		12	12				
							Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang		67	27				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2	12	12	100
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		5	5				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang		4	4				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan					120	120	100
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan		6	6				
							Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%		83	86	100			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit		140	12	8	9	9	100
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit		100	72				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				140	110	110	100
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jenis		1	4				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				559	287	287	100
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	Jenis		12	1				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit				1	1	1	100
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pelayanan keamanan kantor yang dibayarkan	Bulan		3	1				
							Jumlah Gedung Penunjang Kantor yang terpelihara	Jenis		3	3				
							Jumlah Gedung Utama Kantor yang terpelihara	Gedung		1	1				
							Jumlah penunjang gedung kantor yang terpelihara (Halaman Kantor)	Jenis		2	2				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				4	7	7	100
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Jenis		-	1				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				3	4	3	75
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	%		113,72	102,75	102,05			
							Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%		13,72	0,52	15,82			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Pajak Daerah						2.890.535.400.000	3.162.899.149.874	109,422606
						Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Target Pendapatan Daerah	Rupiah		9.000.284.274.889					
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen			4	4			
							Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah						12	12	100
							Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah						12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Laporan potensi dan basis data pajak daerah						2	2	100
							Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih						100	100	100
						Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah dan Target Pendapatan	Dokumen		14	16				
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen				15	13	13	100
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Pajak Daerah	Dokumen		22	29				
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen				4	12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Media Sosialisasi Cetak	Buah		6.477	3.322				
							Jumlah Media Sosialisasi Elektronik	Media		3	3				
							Jumlah Media Sosialisasi Tatap Muka	Orang		788	618				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan				4	12	12	100
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jaringan		1	1				
							Tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi		5	3				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit				3	3	3	100
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata			6.310					
							Jumlah Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Obyek Pajak		58.181	94.839				
							Jumlah Perumahan yang didata	Perumahan		80	68				
							Jumlah Wajib Pajak Daerah yang didata	SPTPD		31.708	43.565				
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan				5	12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan				20	20	20	100
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Wajib Pajak		103.522	105.866				
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Wajib Pajak		110.756	113.890				
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Wajib Pajak		270.998	136.252				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Wajib Pajak		152.588	271.914				
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Wajib Pajak		59.962	60.000				
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Wajib Pajak		350	376				
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Wajib Pajak		295.735	288				
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Wajib Pajak		157.889	166.649				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Wajib Pajak		186.000	183.309				
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Wajib Pajak		176.000	170.414				
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan							
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah			12	10.000				
							Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah	Objek Pajak		7.000					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan				5	12	12	100
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Desa yang Dinilai Ketetapan nya	Desa		68	85				
							Jumlah Obyek Pajak PBB yang dinilai	Obyek Pajak		115	100				
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak				83	5759	6000	104,184754
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Berkas		12	2.030.945	12	12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		1.960.000	12				
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan pelayanan	Berkas Pelayanan		177.228	190.767				
							Jumlah wajib pajak permohonan pelayanan	Wajib Pajak		204.673	249.263				
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan				231.562	200.000	218738	109,369
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Orang		1.000	4.800				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Dokumen		1.000	1.200				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Orang		1.425	2.400				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Dokumen		1.500	2.000				
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Orang		2.000	2.100				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Dokumen		2.400	1.150				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Orang		1.200	1.200				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Dokumen		1.680	1.680				
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Orang		3.600	3.600				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Dokumen		4.000	4.000				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Orang		1.110	210				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Dokumen		550	101				
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Orang		1.500	1.644				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Dokumen		1.500	1.644				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Orang		1.450	850				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Dokumen		1.200	1.047				
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Orang		325	1.400				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Dokumen		526	970				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Orang		1.365	6.300				
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Dokumen		800	2.400				
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan							
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan				4.800	4800	4800	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan				2.400	2400	2400	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan				2.100	2100	2100	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan				1.680	1680	1680	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan				3.600	3600	3600	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan				210	210	210	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan				1.644	1644	1644	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan				850	850	850	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan				1.400	1400	1400	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan				6.300	6300	6300	100
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan yang divalidasi	Berkas		67.246	60.960				
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen				60.896	80.000	80000	100
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang yang tertagih	Rupiah		194.058.645.778	181.775.852.330				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen				12	5091	5091	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Wajib Pajak		30.360	15.699				
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Wajib Pajak		111.112	56.945				
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Wajib Pajak		57.966	68.126				
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Wajib Pajak		2.296	120				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Wajib Pajak		1.187	812				
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Wajib Pajak		111.220	60.573				
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Wajib Pajak		110.200	1.215				
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Wajib Pajak		159.045	54.755				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Wajib Pajak		18.360	5.369				
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Wajib Pajak		11.385	1.185				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Dokumen				120	120	120	100
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan penyelesaian keberatan	Wajib Pajak Daerah		7.133	7.186				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen				12	6000	6594	109,9

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan	Dokumen Laporan		2	2				
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen				2	20	20	100
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Triwulan untuk 3 Jenis Retribusi	Laporan Kegiatan		4	4				
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan				4	4	4	100
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Laporan							

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
													TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan				2	2	2	100

2.1.1 Uraian Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

1. Masih kurang dan belum meratanya SDM;
2. Masih kurangnya kompetensi SDM (Bidang Teknologi Informasi, pengelola keuangan);
3. Belum adanya tenaga fungsional yang memiliki keterampilan/kompetensi khusus seperti juru sita pajak, arsiparis, pranata komputer, pemeriksa pajak, penilai (pendanil), analis pajak dan legal drafting (konsistensi dengan slide paparan);
4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Perencanaan kebutuhan barang belum sesuai dengan analisis kebutuhan;
6. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja (Kendaraan mobil pelayanan keliling, intrakstruktur sistem informasi, digitalisasi arsip perpajakan daerah, ruangan arsip);
7. Sistem Administrasi Surat Menyurat masih belum optimal;
8. Belum lengkapnya regulasi terkait sisdur, juklak dan SOP (tentang pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah, formulasi yang dijadikan acuan dalam penghitungan target pajak daerah dan retribusi daerah, penagihan dengan upaya paksa);
9. Belum ada regulasi pusat dan provinsi (terkait turunan UU HKPD, KEK) yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah;
10. Perencanaan Pendapatan Daerah belum Optimal;
11. Belum lengkapnya sistem monitoring pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi;
12. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi;
13. Belum optimalnya integrasi pajak daerah dilingkup internal dan eksternal;

14. Belum optimalnya pengolahan basis data untuk disajikan menjadi informasi pendapatan daerah (NJOP PBB-P2 belum sesuai dengan nilai pasar, Data PBB-P2 belum mutakhir, data penerimaan BPHTB dari kebijakan PTSL);
15. Belum terpetakannya data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
16. Integrasi data baik internal maupun eksternal belum optimal (provinsi, antar perangkat daerah);
17. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan online pajak daerah;
18. Pemahaman yang tidak seragam terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah baik internal maupun eksternal (wajib pajak);
19. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait pemungutan pajak;
20. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan kondisi *force majeure* yang menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

2.1.2 Uraian Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kabupaten Bogor;
2. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan mengoptimalkan pendataan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;

3. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya telah melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah untuk menghasilkan PAD.

2.1.3 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

1. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat melalui Inovasi Sistem Informasi (Implementasi Halo Bappenda, Pendistribusian SPPT Elektronik dan Pengembangan Intergrasi Data Pajak Daerah), Pelayanan Online dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pembayaran;
2. Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui pemutakhiran data potensi pajak daerah;
3. Penerapan stimulus fiskal bagi wajib pajak;
4. Optimalisasi penerimaan piutang pajak daerah melalui pemutakhiran data piutang dan penagihan piutang;
5. Penyiapan dan Penyempurnaan Produk Hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penegakan sanksi terkait dengan telah diundangkannya UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Meningkatkan kerjasama dengan : Kantor Pajak Pratama (KPP) & Badan Pertahanan Nasional (BPN) (kaitan optimalisasi penerimaan BPHTB); Kejaksaan Negeri Cibinong (kaitan piutang PBB P2). BJB, BRI (kaitan setoran Pajak Daerah);
7. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kemendagri, Kemenkeu, Provinsi dan ESDM Provinsi;
8. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah dan peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 1 (satu) indikator sasaran dan 1 (satu) indikator tujuan tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama 108,57%. Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2024 dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan renstra yaitu **“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** dengan indikator **Rasio PAD terhadap APBD** dengan target 40,80% terealisasi sebesar 44,71% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 109,57%. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka telah ditetapkan 1 (satu) **Sasaran** yaitu :

1. **Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah**, dengan indikator sasaran **a) Rasio Pajak Daerah terhadap APBD** dengan target 26,65% terealisasi sebesar 28,66% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 107,58%, dengan program dan indikator capaian program sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator capaian program **Pajak Daerah** .

Jika dilihat tahun sebelumnya yakni tahun 2022 rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 92,17% , dan tahun 2023 rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 91,71% yakni lebih kecil dari tahun 2022, tahun 2024 jauh berbeda dengan tahun 2022 dan tahun 2023, jika di tahun 2024 mencapai di angka 100%. Hasil analisis kinerja pelayanan disajikan dalam tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

TABEL 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2024

URUSAN : PENUNJANG
BIDANG URUSAN : KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	TAHUN 2020								
	TUJUAN :								
1.	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel								
	INDIKATOR TUJUAN :								
a.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	36,72						
	SASARAN :								

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
1.	Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas								
	INDIKATOR SASARAN :								
a.	Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	98,80						
2.	Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif								
	INDIKATOR SASARAN :								
b.	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	65,68						
	TAHUN 2021-2023								
	TUJUAN :								
1.	Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel								
	INDIKATOR TUJUAN :								

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	Rasio PAD	%		43,02	41,38	41,43			
	SASARAN :								
1.	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif								
	INDIKATOR SASARAN :								
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%		41,59	41,38	41,43			
	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%		65,62	69,46	69,54			
	TAHUN 2024								
	TUJUAN :								
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)								
	INDIKATOR TUJUAN :								
	Rasio PAD Terhadap APBD	%					40,80	44,71	109,57

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	SASARAN :								
	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah								
	INDIKATOR SASARAN :								
	Rasio Pajak Daerah Terhadap APBD	%					26,65	28,66	107,58

Berdasarkan tabel 2.2 untuk indikator tujuan target tahun 2024 sebesar 40,80% dan terealisasi sebesar 44,71% sehingga menghasilkan tingkat capaian realisasi sebesar 109,57%, hasil capaian berada di atas angka 100%. Hal yang sama juga terjadi pada indikator sasaran pada tingkat capaian realisasi yang mencapai angka 107,58%.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan di bidang pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan Kabupaten Bogor, melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- c) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Masalah pokok yang dialami Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yaitu “Belum Optimalnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif”. Dapat dilihat di bawah ini masalah pelayanan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi (juru sita pajak, pemeriksa pajak, penilai pajak);

- 2) Belum optimalnya updating data sebagai bahan penyusunan perencanaan target Pendapatan Daerah;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan pajak daerah, sehingga memerlukan waktu yang relatif lama (kurang efisien) dalam penyajian piutang pajak;
- 4) Belum optimalnya tingkat pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah;
- 5) Belum tersedianya regulasi serta juklak mengenai Retribusi Daerah;
- 6) Data Retribusi Daerah belum diolah dan dikelola secara digital sehingga sulit untuk menentukan Potensi Retribusi Daerah;
- 7) Opsen masih tergantung pada regulasi Provinsi;
- 8) Evaluasi terhadap pemanfaatan aset belum optimal sehingga berpengaruh terhadap potensi Retribusi Daerah;
- 9) Sistem Bappenda belum terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki potensi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan peluang yang harus diselesaikan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*). Selain itu dengan adanya dinamika terhadap peraturan perundang-undangan maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka memenuhi tantangan dan peluang tersebut. Berikut telah dirangkum sejumlah tantangan di bawah ini :

- 1) Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- 2) Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- 3) Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;
- 4) Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (better, faster, cheaper);
- 5) Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan good governance dan clean government seiring dengan agenda reformasi birokrasi;
- 6) Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi tantangan bagi Bappenda dalam pembentukan produk hukum pajak daerah sebagai implementasi dari Undang-undang tersebut.

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula beberapa peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, antara lain sebagai berikut:

- a) Padatnya penduduk dan mahalannya hunian di wilayah DKI Jakarta, mendorong pertumbuhan penduduk di daerah penyangga (*hinterland*) yaitu Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dengan meningkatnya infrastruktur dan sarana transportasi, Kabupaten satelit Ibu Kota menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat tinggal, sehingga hal itu berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Bogor;
- b) Kewajiban membayar pajak harus diiringi dengan sanksi ketika tidak dijalankan, harus dilakukan penyusunan aturan yang memuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta penegakan aturan tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait;
- c) Tersedianya integrasi sistem sebagai sarana data informasi terpadu dan terpusat yang akurat, valid, dan cermat serta detil mengenai objek pajak, Wajib Pajak serta data-data lain yang terkait dengan perpajakan bersinergi dengan data-data yang dimiliki/dibutuhkan oleh SKPD lainnya (Kependudukan, DPMTSP, BPN, Dinsos);

- d) Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT;
- e) Dibuatnya suatu sistem dengan menggunakan teknologi yang mempermudah dan mempercepat pembayaran, pengecekan & penelusuran pajak, baik bagi masyarakat sebagai pembayar pajak maupun pemerintah sebagai penerima pajak, bersinergi dengan bidang teknologi lainnya, seperti sistem pembayaran cashless, sistem cetak tagihan mandiri, *complain online robotic*;
- f) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maka terdapat beberapa peluang bagi Kabupaten Bogor untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan baru seperti Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Berangkat dari uraian di atas, maka isu-isu strategis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi dan kemampuan SDM yang belum efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 2) Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah belum optimal karena penggunaan aplikasi berbasis digital belum dilaksanakan secara efektif, belum didukung oleh kajian potensi Pendapatan Daerah;
- 3) Belum optimalnya integrasi sistem untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi perpajakan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran. Pada rancangan awal Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada di angka Rp. 254.690.093.189,- tetapi seiring berjalannya waktu penambahan ataupun pengurangan anggaran pun ikut berjalan dikarenakan adanya

penambahan target juga ikut serta penambahan anggaran belanja guna untuk memenuhi pencapaian target.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor di dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2026) akan disusun sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang diperoleh berdasarkan penjaringan aspirasi melalui jalur partisipatif (Musrenbang kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, serta jalur perencanaan (teknokratik). Pada saat menyusun rancangan akhir RKPD tahun 2026 Bappenda mengampu 2 program, 9 kegiatan, dan 60 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 244.308.316.880 . Dari rancangan awal ke tahapan rancangan akhir Bappenda mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 10.381.776.310 , tetapi tidak semua sub kegiatan mengalami penurunan, terdapat juga subsidi silang antar sub kegiatan. Adapun anggaran usulan tahun 2026 tersebut akan dipergunakan untuk *cost sharing* dari penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat anggaran untuk *cost sharing* sebesar Rp. 4.724.314.760,00 ;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat anggaran untuk *cost sharing* sebesar Rp. 5.784.444.750,00.

Secara keseluruhan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

URUSAN : **PENUNJANG**
BIDANG URUSAN : **KEUANGAN**
PERANGKAT DAERAH : **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						254.690.093.189						246.623.521.585	
1	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pajak Daerah	Rupiah	3.200.305.975.941	35.998.320.457	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pajak Daerah	Rupiah	3.200.305.975.941	27.454.177.912	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	12		Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Laporan Perencanaan, Pengembangan , dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	12		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah	Laporan	12				2. Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah	Laporan	12		
			3. Laporan potensi dan basis data pajak daerah	Laporan	2				3. Laporan potensi dan basis data pajak daerah	Laporan	2		
			4. Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih	%	100				4. Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih	%	100		
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		295.867.389	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	16	364.368.193	
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	545.375.859	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	514.966.451	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	2.945.935.727	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	1.048.810.950	
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	2.374.702.283	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	1.427.805.946	
	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	7.389.914.494	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	2.061.385.282	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	2	1.068.143.399			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Laporan	2	1.082.732.392	
	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	431.831.124	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	874.943.419	
	7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bappenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5.439	575.538.697	7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bappenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5.439	794.660.143	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.582.093.812	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.461.013.421	
	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	210.000	2.197.227.399	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	210.000	2.210.462.215	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800	179.003.606			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800	199.197.433	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400	245.623.059			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400	324.859.714	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100	130.366.864			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100	192.242.974	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680	189.314.149			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680	223.280.636	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600	147.918.390			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600	145.684.795	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210	288.694.480			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210	334.448.330	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644	235.166.273			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644	230.489.588	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850	170.398.808			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850	140.886.425	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	1.400	185.064.469			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	1.400	204.413.021	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300	224.528.139			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300	217.666.603	
	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	90.000	601.032.197	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	90.000	852.464.858	
	11. Penagihan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5.590	1.902.410.324	11. Penagihan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5.590	2.065.769.961	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Dokumen	12	9.540.530.808			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Dokumen	12	7.718.198.449	
	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		906.095.124	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		968.106.541	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	25	1.169.049.952	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	25	1.264.947.320	
	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	120.937.210	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	187.861.231	
	15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	355.556.422	15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	342.511.624	
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan			Persentase		218.691.772.732	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan			Persentase		219.169.343.674	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	17	2.120.853.012	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	17	2.003.672.668	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	228.748.538	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	219.110.559	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	232.027.478	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	211.904.396	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	173.140.566	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	160.204.037	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	191.711.100	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	175.435.282	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	346.382.671	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	298.145.855	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	206.000.171	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	228.500.368	
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	614.482.851	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	566.445.934	
	8. Ewalidata					128.359.637	8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	143.926.237	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	182.031.050.309	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	176.683.068.346	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	183/12	181.155.924.939	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	183/12	175.671.526.106	
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1100	392.113.300	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.100	443.477.870	
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	84.168.463	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	105.572.518	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	115.056.868	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	129.826.252	
	5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappenda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3		5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappenda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3		
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	181.683.048	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	208.223.364	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	102.103.691	7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	124.442.237	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	3.025.012.369	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	2.272.368.367	
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	97.537.781	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	80.419.500	
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	17.149.500	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	323.842.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	1.792.355.523	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	808.704.601	
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	175.255.910	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	192.486.919	
	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	478.935.635	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	173.754.543	
	9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	126.690.000	9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	123.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	185	144.579.360	10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	185	214.377.107	
	11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	192.508.660	11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	355.783.197	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%	100	12.109.996.996	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%	100	10.140.602.648	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	190.785.731	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	190.061.076	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	8.704.691.290	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6.392.819.698	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket	20	155.557.811			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	20	163.268.245	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	203.842.559	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	204.566.951	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket	10	114.488.821			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket	10	134.232.566	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	1.227.249.923	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	472.341.063	
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappenda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	157.558.173	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappenda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	163.994.730	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket	10	63.860.737			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	10	66.683.417	
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1		
	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	165.321.180	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	138.883.538	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	302.006.815	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1.126.935.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	20	471.831.155			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	20	514.967.500	
	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	352.802.801	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	571.848.866	
	10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-		10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					244.131.972	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					302.351.152	
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	86.187.529	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	117.426.576	
	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	157.944.443	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	184.924.576	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	7.201.603.898	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	15.190.105.975	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	2.260.990.080	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	3.244.752.000	
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	3.309.140.668	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	556.023.420	
	3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bappenda	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-		3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bappenda	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-		
	4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	91.263.150	4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10.207.330.555	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	400.000.000	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	1	195.700.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	1	190.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	1	227.630.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	1	245.000.000	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	1	158.620.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	1	175.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	1	206.000.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	1	200.000.000	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	1	187.460.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	1	197.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	1	164.800.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	1	175.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik	%	100	6.296.819.604	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik	%	100	8.848.436.150	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	3.713.191.200	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4.323.780.200	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	12	542.612.796			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	12	552.008.016	
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	10	99.894.293			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	10	99.797.250	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	757.908.526	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	757.678.548	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	12	1.183.212.789			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	12	3.115.172.136	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	5.662.304.572	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	3.728.738.368	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	187.130.400	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	196.660.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	140	1.266.591.000	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	140	1.061.000.000	
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	2.273.334.273	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	846.745.600	
	4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappenda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	57.165.000	4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappenda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	220.000.000	
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	783.469.191	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	678.500.108	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.094.614.708	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	725.832.660	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini hasil kajian terhadap usulan program/kegiatan/sub kegiatan, khususnya dari Bappenda tidak terdapat yang bersumber dari masyarakat, dituangkan pada tabel 2.4 dengan format sebagaimana terlampir.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN BOGOR

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PERANGKAT DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menenkankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu, perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026, sebagaimana terlampir tabel 3.1 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.

TABEL 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Tata Kelola Pajak Daerah	Pajak Daerah	3.852.645.892.463	Rupiah	244 .308.821.289

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026, sebagaimana terlampir tabel 3.2 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026.

TABEL 3.2
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Tata Kelola Pajak Daerah	Pajak Daerah	3.835.688.382.057	Rupiah	244.308.821.289

Tabel 3.3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Peningkatan Pendapatan Daerah	- Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah - Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah - Pelaksanaan reformasi birokrasi - Pelaksanaan administrasi Badan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah - Subid Perencanaan - Subid Pengembangan - Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi 2. Bidang Pendataan dan Penilaian - Subid Pendataan - Subid Penilaian - Kelompok Substansi Pengolahan Data 3. Bidang Pelayanan dan Penetapan - Subid Pelayanan - Kelompok Substansi Verifikasi - Subid Penetapan 4. Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan - Subid Penagihan - Subid Keberatan - Kelompok Substansi Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah 5. Sekretariat - Kelompok Substansi Program dan Pelaporan - Subag Keuangan - Subag Umum dan Kepegawaian

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

Pernyataan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan ditarik berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Oleh karena itu semakin meningkat PAD suatu daerah maka diharapkan semakin meningkat kemandirian daerahnya.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota,

sedangkan Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- c. Sasaran memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C)*.

Berangkat dari hal-hal tersebut, Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah;
- 2. Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah.

Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah dari komponen Pajak Daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dengan indikator sasaran yaitu sebagai berikut:

- 1. Rasio Pajak Daerah terhadap APBD;
Nilai Rasio Pajak Daerah terhadap APBD ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap APBD} = \frac{\text{Jumlah Target Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Jumlah Target APBD}}$$

- 2. Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD.

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD} = \frac{\text{Jumlah Target Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Jumlah Target APBD}}$$

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, disajikan.dalam.tabel.3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN					
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rasio PAD Terhadap APBD	Jumlah Target PAD dibagi jumlah target APBD	62,66	Persentase
SASARAN					
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	Jumlah Target Pajak Daerah dibagi jumlah target APBD	46,81	Persentase
Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah		Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	Jumlah Target Retribusi Daerah dibagi jumlah target APBD	14,12	Persentase

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah masuk ke dalam Urusan Penunjang, bidang Urusan Keuangan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tercantum dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ke dalam program,

kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri 90 Tahun 2019, terdiri dari 1 (satu) Program Utama, 1 (satu) Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator program :

- Pajak Daerah, dengan target Rp.3.852.645.892.463,00 ;

Jumlah kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya 1 kegiatan yaitu **“Pengolaan Pendapatan Daerah”** dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

- Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dengan target 100%;
- Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 83%;
- Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah, dengan target 10,55%;
- Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah, dengan target 100%.

Berikut rincian 15 Sub Kegiatan di bawah ini :

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah;

6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan indikator Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya;
8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah;
9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi;
11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah;
12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah;
14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan indikator Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
15. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Sedangkan Program Penunjang yaitu **“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”** dengan 8 (delapan) kegiatan (1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,

(6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.5 di bawah ini.

TABEL 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
				244.308.821.288,80
Sekretariat				
Sub Bag Program dan Pelaporan	1	1	8	2.003.672.664,00
Sub Bag Keuangan	1	1	7	178.114.045.361,99
Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	6	35	30.878.810.477,99
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah				
Sub Bidang Perencanaan	1	1	2	584.259.497,00
Sub Bidang Pengembangan	1	1	2	2.184.837.998,00
Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi	1	1	1	1.917.922.066,50
Bidang Pendataan dan Penilaian				
Sub Bidang Pendataan	1	1	1	4.834.015.979,00
Sub Bidang Penilaian	1	1	1	558.432.739,00
Sub Bidang Pengolahan Data	1	1	1	401.902.608,00
Bidang Pelayanan dan Penetapan				
Sub Bidang Penetapan	1	1	1	1.185.002.202,00
Sub Bidang Pelayanan	1	1	1	2.035.479.736,50
Sub Bidang Verifikasi	1	1	1	510.065.379,00
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan				
Sub Bidang Penagihan	1	1	1	1.804.997.280,00
Sub Bidang Keberatan	1	1	1	774.987.420,50
Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah	1	1	2	1.076.153.744,50
UPT Pajak Daerah	2	4	11	15.444.236.134,82

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan dokumen rencana perangkat daerah. Renja Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa pada Tahun 2026 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor akan melaksanakan 1 (satu) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang. Program Utama diturunkan ke dalam indikasi Kegiatan yang hanya berjumlah 1 (satu) Kegiatan, dan diturunkan ke dalam sub Kegiatan yang berjumlah 15 (lima belas) sub Kegiatan, masing-masing sub Kegiatan diberikan dukungan pendanaan yang masih bersifat indikatif yang bersumber dari APBD. Sedangkan untuk Program Penunjang diturunkan ke dalam indikasi Kegiatan yang hanya berjumlah 8 (delapan) Kegiatan. Secara keseluruhan, pagu indikatif Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 pada Rancangan Akhir RKPD sebesar Rp. 244.308.316.880,00 .

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 secara rinci disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut.

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026

URUSAN / UNSUR
 BIDANG URUSAN
 PERANGKAT DAERAH

: PENUNJANG
: KEUANGAN
: BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					244.308.316.881,00				257.254.906.211
1	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Rupiah	3.200.305.975.941	28.017.137.556,83			3.200.305.975.941	29.417.994.435
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	%	100	28.017.137.556,83			12	29.417.994.435
		Persentase Capaian Layanan Pajak Daerah yang sesuai Prosedur	%	83,00				12	
		Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	%	2,5				2	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah	%	100				100	
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	13	241.917.522,00	Bappenda		16	254.013.398
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	447.612.050,00	Bappenda		12	469.992.653
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	1.737.225.948,00	Bappenda		12	1.824.087.245
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	1.917.922.066,50	Bappenda		3	2.013.818.170
	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	4.834.015.979,00	Bappenda		12	5.075.716.778

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	20	1.105.543.802,33			2	1.160.820.992
	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	401.902.608,00	Bappenda		12	421.997.738
	7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5.439	558.432.739,00	Bappenda		19	586.354.376
	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.185.002.202,00	Bappenda		12	1.244.252.312
	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	210.000	2.035.479.736,50	Bappenda		200.000	2.137.253.723
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800	163.875.543,75			4.800	172.069.321
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400	224.930.783,50			2.400	236.177.323

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100	99.999.604,75			2.100	104.999.585
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680	139.742.355,00			1.680	146.729.473
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600	99.999.271,75			3.600	104.999.235
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210	249.969.826,00			210	262.468.317
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644	199.999.697,25			1.644	209.999.682
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850	140.886.390,25			850	147.930.710
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	1.400	149.528.300,75			1.400	157.004.716
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300	189.933.702,25			6.300	199.430.387
	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	90.000	510.065.379,00	Bappenda		90.000	535.568.648

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.804.997.280,00	Bappenda		5	1.895.247.144
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Dokumen	120	7.384.671.629,25			5	7.753.905.211
	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	774.987.420,50	Bappenda		12	813.736.792
	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	2	985.109.085,25	Bappenda		12	1.034.364.540
	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	91.044.659,25	Bappenda		4	95.596.892
	15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	342.341.975,00	Bappenda		2	359.459.074
									-
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	216.291.179.324,17				227.836.911.776

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	Persentase	100	2.003.168.256,20			100	2.103.326.669
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	219.090.090,75	Bappenda		4	230.044.595
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	211.855.893,75	Bappenda		1	222.448.688
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	160.134.354,75	Bappenda		1	168.141.072
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	175.265.062,50	Bappenda		2	184.028.316
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	298.110.524,55	Bappenda		2	313.016.051

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	228.474.758,85	Bappenda		4	239.898.497
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	566.431.631,30	Bappenda		4	594.753.213
	8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	143.805.939,75	Bappenda		1	150.996.237
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Persentase	100	178.114.045.361,99			100	187.019.747.630
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		183/12	177.134.979.734,24	Bappenda		175/12	185.991.728.721
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1100	443.477.723,75	Bappenda		1.930	465.651.610

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	105.572.592,25	Bappenda		12	110.851.222
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	97.349.636,75	Bappenda		1	102.217.119
	5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			Bappenda		3	-
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	208.223.240,00	Bappenda		36	218.634.402
	7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	124.442.435,00	Bappenda		1	130.664.557

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	1.536.587.491,75			100	1.613.416.866
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	80.419.500,00	Bappenda		1	84.440.475
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	110	39.127.500,00	Bappenda		110	41.083.875
	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	718.240.690,25	Bappenda		2	754.152.725
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	155.456.136,75	Bappenda		4	163.228.944
	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	172.747.350,00	Bappenda		12	181.384.718
	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	123.000.000,00	Bappenda		10	129.150.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	185	119.332.048,75	Bappenda		185	125.298.651
	8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	128.264.266,00	Bappenda		200	134.677.479
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100	9.569.832.689,39			100	10.048.324.324
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	185.316.997,50	Bappenda		1	194.582.847
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6.412.220.525,02	Bappenda		6	6.732.831.551
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Paket	20	150.342.840,00			20	157.859.982

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	151.122.892,50	Bappenda		1	158.679.037
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket	10	130.625.799,00			10	137.157.089
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1.243.218.512,50	Bappenda		6	1.305.379.438
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	151.708.695,00	Bappenda		1	159.294.130
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Paket	10	66.352.775,25			6	69.670.414
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-		Bappenda		-	-
	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	139.553.625,00	Bappenda		11	146.531.306

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	155.226.000,00	Bappenda		2	162.987.300
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (10 UPT Pajak Daerah Kelas A)	Laporan	20	478.154.780,00			20	502.062.519
	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	305.989.247,62	Bappenda		12	321.288.710
	10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-		Bappenda		-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	208.406.204,25				950.000.000
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	61.101.339,00	Bappenda	APBD	1	150.000.000
	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	147.304.865,25	Bappenda	APBD	12	800.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	13.235.426.488,32			100	13.897.197.813
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8	1.896.736.724,75	Bappenda		8	1.991.573.561
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1.589.342.011,50	Bappenda		3	1.668.809.112
	3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-		Bappenda		-	-
	4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8.567.347.626,32	Bappenda	1		8.995.715.008
	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.182.000.125,75	Bappenda	1		1.241.100.132
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	1				1	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	1				1	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	1				1	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	1				1	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	1				1	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	1				1	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik	%	100	8.726.410.539,99			100	9.162.731.067
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.580.702.200,00	Bappenda		12	3.759.737.310
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan	120	555.648.939,99			12	583.431.387
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Bappenda			-

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan	10	98.092.500,00			10	102.997.125
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.858.029.432,00	Bappenda		12	1.950.930.904
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Laporan	120	2.633.937.468,00			12	2.765.634.341
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	2.897.302.292,28			100	3.042.167.407
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	198.672.600,00	Bappenda		9	208.606.230

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110	1.078.202.000,00	Bappenda		110	1.132.112.100
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	528.117.300,00	Bappenda		8	554.523.165
	4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	55.179.152,28	Bappenda		1	57.938.110
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	349.948.000,00	Bappenda		5	367.445.400
	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	687.183.240,00	Bappenda		3	721.542.402
									-
									0

BAB V

P E N U T U P

Demikian Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029, maka Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

